

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kesenjangan ekonomi di Provinsi Papua tahun 2011-2015 telaah ekonomi Islam, dari bab I sampai bab IV dapat ditarik kesimpulan beberapa poin sebagai berikut :

1. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Papua sangat mencolok, bahkan Papua adalah wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Dengan angka kemiskinan 28,17 persen di tahun 2015 dari jumlah penduduk 3.149.375 jiwa. Ini berarti jumlah penduduk miskin di Papua sebanyak 887.179 jiwa. Nilai gini rasio Papua pada tahun 2015 adalah 0,42 yang berarti kategori ketimpangan menengah, kemudian nilai gini rasio di Papua cukup bervariasi antara kabupaten dan kota. Selain itu Provinsi Papua adalah provinsi yang menyumbang angka daerah tertinggal terbanyak, dari 29 kabupaten dan kota 25 daerah yang dinyatakan tertinggal dan 4 daerah lainnya dinyatakan maju. Sedangkan tanah Papua yang terbentang dari Provinsi Papua hingga Provinsi Papua Barat, menjadi salah satu kawasan dengan keunggulan sumber kekayaan alam terbesar dan terkaya di dunia. Hal itu ditunjukkan adanya cadangan emas dan tembaga yang dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia merupakan salah satu cadangan terbesar didunia. Kategori pertambangan dan penggalan mendominasi perekonomian Provinsi Papua tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 32,60 persen.

Kategori lain yang juga berperan penting dalam perekonomian Papua adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 13,38 persen, Kategori konstruksi 13,21 persen dan kategori administrasi pemerintahan 9,73 persen.

2. Pandangan ekonomi Islam melihat kesenjangan ekonomi di Provinsi Papua yaitu perlu adanya instrumen kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan tersebut. Kesenjangan ekonomi disuatu daerah dalam konsep ekonomi Islam umumnya dikarenakan keadilan distribusi seperti zakat, sedekah, infak dan wakaf tidak maksimal. Namun, konsep tersebut bila diterapkan di Papua kurang efektif, karena penduduk muslim di Papua hanya 13,15 persen. Lima dimensi kebijakan yang disarankan untuk memecahkan persoalan kesenjangan ekonomi tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan adalah integrasi dimensi moral dan material kehidupan yang direfleksikan dalam paket kebijakan, yaitu pembangunan manusia, mengurangi pemusatan kekayaan, restruktur ekonomi, restrukturisasi keuangan dan perencanaan kebijakan strategis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran untuk kemajuan ekonomi di Provinsi Papua:

1. Pemerintah Provinsi Papua harus lebih kerja keras lagi untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Seperti pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan.

2. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi.
3. Peningkatan pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan. Kemudian peningkatan kemudahan perijinan usaha khususnya pada sektor pertanian dan industri pengolahan.
4. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur dan pengembangan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dan pembangunan SDM.
5. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah. Dan peningkatan harmonisasi antar pekerja dan perusahaan.